

Peran *Stakeholder* terhadap Pengembangan Potensi Bunga Mawar di Desa Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali

Aulia Afifah*), Siwi Istiana Dinarti, Sofia Rahmawati

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, INSTIPER Yogyakarta

*)Email Korespondensi: auliaafifah222@gmail.com

ABSTRAK

Bunga mawar merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta potensi untuk dikembangkan melalui berbagai bentuk usaha agribisnis. Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu sentra produksi bunga mawar di Jawa Tengah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun demikian, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya diversifikasi produk, serta kurangnya inovasi dalam pengolahan hasil. Oleh karena itu, peran stakeholder menjadi penting dalam mendukung pengembangan potensi bunga mawar secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program yang diberikan oleh stakeholder serta menganalisis peran stakeholder dalam pengembangan potensi bunga mawar di Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling, sedangkan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder berperan melalui berbagai program seperti pendampingan kelompok tani, pelatihan pengembangan kapasitas, bantuan sarana dan prasarana produksi, dukungan pemasaran melalui pameran dan bazar, serta fasilitasi koordinasi antar lembaga. Peran stakeholder dalam pengembangan potensi bunga mawar meliputi Dinas Pertanian sebagai pembina teknis, Dinas UMKM dalam pengembangan usaha dan pemasaran, pemerintah desa sebagai fasilitator dan koordinator, serta petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan budidaya dan produksi. Sinergi antar stakeholder tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan potensi bunga mawar secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Stakeholder, Bunga Mawar, Pengembangan Potensi

PENDAHULUAN

Pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu subsektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah hortikultura, termasuk budidaya tanaman hias seperti bunga mawar. Selain sebagai tanaman hias, (*Rosa Hybrida* L.) juga digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bunga potong, parfum, hingga minyak esensial. Beberapa varietas dari (*Rosa Hybrida* L.) juga digunakan dalam industri kosmetik dan kesehatan karena kandungan zat aktif yang dimilikinya.

Jawa tengah menjadi salah satu provinsi sebagai sentra produksi mawar di Indonesia. Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali merupakan sentra budidaya bunga mawar di Jawa Tengah. Letaknya yang berada di lereng Gunung Merapi dengan suhu sejuk dan tanah yang subur menjadikan wilayah ini sangat cocok untuk pengembangan komoditas

hortikultura (Putri et al., 2023). Kecamatan musuk memiliki luas panen dan produksi mawar tertinggi di antara kecamatan lain yang ada di kabupaten boyolali. Seperti di tahun 2023 luas panen sebesar 310.000 m² dengan total produksi 14.750.000 tangkai bunga mawar (BPS). Desa Cluntang, memiliki potensi besar dalam budidaya bunga mawar. Mayoritas penduduknya mengandalkan budidaya bunga mawar sebagai sumber penghasilan utama (Nurdiansyah et al., 2023).

Potensi bunga mawar di Desa Cluntang tidak hanya terbatas pada aspek budidaya, tetapi juga berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai komoditas ekonomi unggulan melalui diversifikasi produk seperti bunga potong, minyak atsiri, hingga destinasi wisata edukatif. Dalam konteks pembangunan desa, pengembangan potensi lokal seperti bunga mawar tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya mengandalkan petani saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak yang berkepentingan atau biasa disebut stakeholder. Stakeholder dalam pengembangan pertanian meliputi pemerintah daerah (dinas pertanian, dinas UMKM), lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha/UMKM, serta masyarakat itu sendiri, khususnya kelompok tani. .

Petani di desa cluntang mengalami kendala dalam manajemen persediaan, sehingga mengganggu efektivitas produksi dan pendapatan (Sulistyorini & Utomo, 2023). Keterbatasan akses pasar yang sering kali menekan harga jual dan mengurangi keuntungan petani. Kurangnya inovasi dalam pengolahan bunga mawar juga menjadi kendala dalam meningkatkan nilai tambah produk. Hingga saat ini, mayoritas petani di desa cluntang hanya menjual bunga mawar dalam bentuk segar atau bunga tabur, tanpa adanya diversifikasi produk olahan yang dapat meningkatkan pendapatan secara lebih berkelanjutan.

Petani memiliki potensi yang besar dalam pengembangan bunga mawar baik dari segi budidaya, maupun inovasi dalam mengelola hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari stakeholder yang memiliki peran memberikan kontribusi melalui penyediaan bantuan teknis, pelatihan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta dukungan dalam membuka akses pasar (Astuti & Nugroho, 2020). Selain itu, *stakeholder* yang memiliki otoritas dalam kebijakan publik juga dapat menyusun dan mengimplementasikan program-program yang berpihak pada petani bunga mawar, sehingga mereka memiliki daya saing dan mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan (Putri & Sari, 2022).

Dalam konteks tersebut, stakeholder diharapkan mampu memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan teknis anggota kelompok. Selain itu, stakeholder juga dapat berperan dalam memperluas jejaring pasar dan memfasilitasi promosi produk olahan mawar seperti teh mawar, sirup mawar, dan keripik mawar agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Boyolali tetapi juga di daerah sekitarnya (Hidayati et al., 2025). Maka, penting untuk mengkaji sejauh mana peran Stakeholder telah diimplementasikan dalam mendukung pengembangan bunga mawar di Desa Cluntang. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui program yang diberikan oleh Stakeholder terhadap perkembangan potensi bunga mawar dan untuk mengetahui peran Stakeholder dalam mengembangkan potensi bunga mawar di Desa Cluntang Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.

METODE PENELITIAN

Penelitian Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang teliti. Lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling, Dengan pertimbangan banyaknya Masyarakat di desa Cluntang memiliki tanaman bunga mawar dan menjadikan bunga mawar sebagai mata pencaharian, maka dari itu peneliti menentukan lokasi di desa Cluntang sebagai tempat penelitian. Kegiatan pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2025. Teknik penarikan Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan Informan di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang memiliki karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tahapan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Observasi, kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif murni untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan Miles, Huberman, dan Saldana (2014), proses analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap utama: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (konfirmasi kembali kepada informan, perbandingan data dari berbagai sumber, analisis silang antara hasil wawancara, dokumentasi dan observasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Program Stakeholder Dalam Pengembangan Potensi Bunga Mawar di Desa Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali

Program-program yang diberikan oleh stakeholder merupakan bentuk dukungan nyata dalam mengembangkan potensi bunga mawar sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Musuk, khususnya di Desa Cluntang. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan bunga mawar meliputi Dinas pertanian, dinas UMKM, Pemerintah desa, serta lembaga pendukung seperti penyuluh dan kelompok tani.

1. Dinas pertanian (BPP)

a. Program Pendampingan Kelompok Wanita Tani

Salah satu program utama yang masih berjalan sampai saat ini, adalah program pendampingan kepada kelompok tani. Bentuk pendampingannya yaitu untuk memastikan bahwa kelompok tani masih aktif berkegiatan, dengan melihat administrasi kelompok dan masih melakukan pengolahan dan penjualan keripik mawar, dan teh mawar. Pendampingan masih rutin dijalankan setiap bulan sekali mengikuti kegiatan pertemuan kelompok wanita tani. Sebagaimana disampaikan oleh informan :

“untuk saat ini belum ada, kemaren di 2025 pengawalan pengolahan dari bunga mawar untuk pemasarannya supaya lebih berkembang”, (IY, 2026)

Pendampingan juga bertujuan untuk melihat produksi bunga mawar dan melakukan konsultasi terkait kendala hama dalam budidaya bunga mawar. Pendampingan penyuluh pertanian dalam hal konsultasi terkait hama pada budidaya mawar dilakukan dengan Berdasarkan hasil wawancara, dinas memberikan pendampingan secara langsung kepada kelompok wanita tani, sebagaimana disampaikan :

“Mendampingi, melihat aktif tidaknya KWT, melihat KWT itu produktif atau tidak, mengecek bidang administrasinya, mendampingi, dan merangsang kelompok supaya ada kemajuan istilahnya memajukan kelompok.”, (SI, 2026)

Berdasarkan apa yang disampaikan informan menjelaskan bahwa program pendampingan yang dilakukan BPP membantu Kelompok Wanita Tani

dalam menjaga keberlanjutan kelembagaan melalui pendampingan mencakup evaluasi keaktifan kelompok, pengecekan administrasi, dan motivasi kemajuan kelompok sebagaimana diungkapkan informan, selaras dengan fungsi penyuluhan pertanian sebagai proses pendidikan nonformal yang bertujuan mengubah perilaku petani menjadi lebih mandiri dan berdaya saing (Dewi, 2025). Program pendampingan ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kelompok tani, baik dalam aspek teknis maupun kelembagaan, sehingga kelompok tani dapat berkembang secara lebih mandiri.

b. Program Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Badan Penyuluh Pertanian bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan program pelatihan kepada kelompok wanita tani untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha dan pengembangan produk. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan administrasi kelompok, pelatihan pengembangan produk olahan berbasis bunga mawar, serta pelatihan prakoperasi. Bentuk pelatihan yang pernah dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu: Teknik pengolahan bunga mawar menjadi produk bernilai tambah (sirup mawar, teh mawar, minyak mawar, dan sirup mawar), Teknik pengemasan dan labeling, Strategi pemasaran produk dan dilaksanakan melalui Praktik langsung (Hands on training), Pendampingan uji coba produk, serta hasil yang diperoleh Diversifikasi produk olahan, Peningkatan nilai tambah komoditas mawar, Meningkatkan daya saing produk lokal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Dua-duanya bermanfaat, pelatihan administrasi dan produk. Produk juga bermanfaat, prakoperasi juga bermanfaat.”, (SI, 2026)

Menurut informan pelatihan administrasi dan pelatihan pengolahan produk berbasis mawar memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota kelompok tani. Pelatihan administrasi, membantu anggota jadi lebih memahami untuk melakukan pembukuan sesuai dengan pelatihan yang diberikan. Pelatihan pengolahan produk membantu anggota mengembangkan kemampuannya dalam diversifikasi produk berbasis mawar.

Penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha kelompok tani (Sukmayanto, 2021). Manfaat pelatihan prakoperasi juga dirasakan oleh kelompok wanita tani, dalam akses permodalan melalui simpan pinjam dengan bunga ringan. Kegiatan prakoperasi lebih sering dilakukan dibandingkan dengan pengolahan produk berbasis mawar yang hanya di produksi ketika ada orang/lembaga yang memesan produk. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kelompok dan penguatan kelembagaan seperti koperasi mampu meningkatkan akses permodalan dan efisiensi usaha petani (Ladunni et al., 2025). Program pelatihan ini memberikan manfaat bagi kelompok tani dalam meningkatkan kemampuan manajemen kelompok serta mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah ekonomi.

c. Program Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi

Selain pelatihan, Dinas Pertanian dan Universitas Boyolali juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana produksi untuk mendukung kegiatan pengolahan bunga mawar. Berdasarkan hasil wawancara, kelompok tani telah menerima bantuan berupa peralatan produksi, sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Bantuan mesin produksi seperti spinner, oven, dan sealer.”, (SI, 2026)

Mesin spinner untuk mengurangi kadar air bahan olahan sehingga kualitas produk lebih tahan lama. Oven pengering untuk proses pengeringan bunga mawar secara higienis dan merata. Sealer untuk meningkatkan kualitas dan kerapian pengemasan produk. Mekanisme dan pendampingan pelaksanaan Bantuan sarana produksi umumnya tidak diberikan secara langsung tanpa arahan, tetapi disertai dengan pelatihan penggunaan alat. Pemberian sarana dan prasarana produksi merupakan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi berbasis agribisnis. Dukungan aset fisik terbukti meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi usaha kelompok tani (Sukmayanto, 2021).

Pemeliharaan dan perawatan mesin dilakukan secara kolektif dengan menggunakan dana kas kelompok serta dana yang berasal dari hasil penjualan produk olahan bunga mawar. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan aset kelompok yang berbasis partisipasi dan kemandirian ekonomi anggota. Selain itu, akses terhadap teknologi dan peralatan produksi berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai tambah produk pertanian dan daya saing usaha kecil berbasis komoditas lokal (Huda et al., 2021).

Dengan demikian, temuan wawancara mengenai bantuan mesin produksi hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menekankan pentingnya dukungan teknologi dan aset produksi dalam meningkatkan efisiensi serta kualitas hasil usaha tani sehingga petani dapat mengembangkan produk olahan bunga mawar dan meningkatkan nilai tambah produk.

2. Dinas UMKM

a. Program Dukungan Pemasaran Produk

Dinas UMKM memberikan dukungan dalam pemasaran produk bunga mawar melalui kegiatan pameran dan bazar. Dengan tujuan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk kelompok tani. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Untuk pemasaran, peran dinas menurut kami cukup membantu, tapi masih perlu ditingkatkan. Biasanya dinas membantu dengan mengikut sertakan kami dalam pameran atau bazar tingkat kabupaten.”, (WI, 2026)

Rangkaian kegiatan berupa pelatihan dan bazar telah dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Tani serta Hari Pangan Sedunia 2025. Selain hanya mengikut sertakan dalam pameran, biasanya dukungan pemasaran juga disertai dengan pelatihan atau pembekalan, yang dilakukan melalui : Pelatihan branding dan packaging, untuk meningkatkan tampilan produk, Pelatihan komunikasi dan promosi, Pelatihan digital marketing. Guna memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk olahan bunga mawar.

Fasilitasi akses pasar terbukti meningkatkan peluang penjualan dan memperkuat posisi tawar kelompok tani (Sukmayanto, 2021). Program ini memberikan kesempatan bagi kelompok tani untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas dan meningkatkan peluang pemasaran. Selain itu, penguatan jaringan pemasaran melalui kemitraan dan promosi kolektif dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas (Ladunni et al., 2025). Dengan demikian, temuan wawancara yang menyatakan bahwa dinas membantu melalui pameran dan bazar tingkat kabupaten sejalan dengan teori pemberdayaan dan penguatan akses pasar dalam pengembangan agribisnis.

3. Pemerintah Desa

a. Program Fasilitasi dan Koordinasi oleh Pemerintah Desa

Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan bunga mawar seperti yang disampaikan oleh informan :

“Mengizinkan penggunaan tanah kas desa seluas 3 hektar untuk digunakan pengembangan bunga mawar”, (IY, 2026)

Pemerintah desa juga berperan sebagai penghubung antara kelompok tani dan dinas terkait, sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Kalau desa itu istilahnya hanya menghubungkan koordinasi dengan dinas ke KWT, dan kalau ada pelatihan atau pemberian bantuan soal mawar desa juga terlibat.”, (BA, 2026)

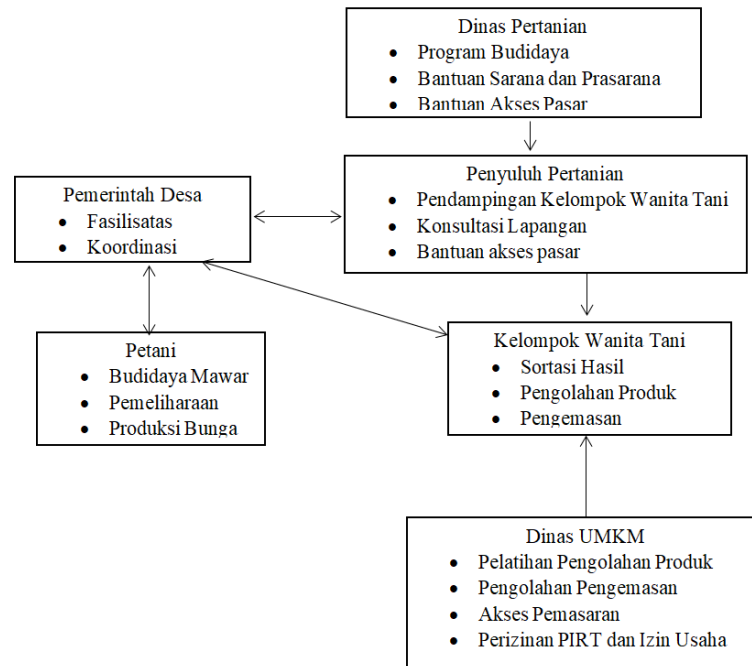
Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator antara kelompok tani (KWT) dengan dinas terkait. Bentuk fasilitas oleh pemerintah desa berupa : Menyampaikan informasi program dari dinas kepada kelompok tani, Memfasilitasi penggunaan lahan , Mendampingi proses pelaksanaan program di tingkat desa, Mendukung administrasi dan legalitas kelompok, Pendampingan saat pelatihan berlangsung.

Hal ini sejalan dengan (Edy et al., 2024) Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan mediator pembangunan sejalan dengan konsep tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam pembangunan pedesaan. Pemerintah lokal memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan berbagai aktor pembangunan agar program berjalan efektif. Selain itu, penguatan kelembagaan di tingkat desa terbukti meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat karena adanya koordinasi dan sinergi antar stakeholder (Ladunni et al., 2025).

Dengan demikian, temuan wawancara yang menyatakan bahwa pemerintah desa berperan sebagai penghubung koordinasi antara dinas dan kelompok tani sejalan dengan teori pemberdayaan dan tata kelola pembangunan berbasis kolaborasi.

B. Peran Stakeholder Dalam Mengembangkan Potensi Bunga Mawar di Desa Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali

Peran stakeholder merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan potensi bunga mawar di Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Stakeholder yang terlibat meliputi pemerintah daerah melalui dinas terkait, pemerintah desa, kelompok tani, serta pihak non-pemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pola hubungan antar-stakeholder dalam pengembangan potensi bunga mawar di Desa Cluntang dapat dipahami melalui integrasi peran yang bersifat saling melengkapi namun belum sepenuhnya simetris.



Gambar 1. Keaktifan Stakeholder

Sumber : Data Primer (2026)

Untuk memahami lebih dalam bagaimana pola integrasi ini terwujud di lapangan, berikut disajikan analisis peran masing-masing stakeholder berdasarkan tiga indikator peran menurut Katz dan Kahn (1978), yaitu norma peran, kejelasan peran, dan harapan peran. Pengembangan potensi bunga mawar di Desa Cluntang melibatkan berbagai stakeholder, antara lain Dinas Pertanian, Dinas UMKM, Pemerintah Desa, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan petani. Peran stakeholder dapat dianalisis berdasarkan indikator norma peran, kejelasan peran, dan harapan peran, yang mencerminkan tanggung jawab, pemahaman tugas, serta ekspektasi terhadap peran masing-masing stakeholder. Peran tersebut berkaitan dengan dukungan teknologi, dukungan pasar, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

1. Dinas Pertanian

a. Norma Peran

Norma peran Dinas Pertanian yang sesungguhnya bersumber dari mandat hukum yang melekat pada institusi ini jauh sebelum ia berinteraksi dengan petani maupun kelompok tani mana pun. Tiga landasan hukum utama membentuk norma peran ini secara tegas. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pasal 7 ayat 2) mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan pertanian, penyediaan sarana produksi, pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian, dan penguatan kelembagaan petani. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga penyuluh dan mengembangkan kapasitas kelembagaan pertanian. Ketiga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani secara khusus menetapkan tanggung jawab dinas atas pembentukan, pengembangan, dan penguatan kelompok tani. Dari ketiga landasan tersebut, tiga ekspektasi normatif utama yang bersifat wajib (mandatory) dapat dirumuskan: (1) menyelenggarakan layanan penyuluhan pertanian yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan komoditas spesifik di wilayah kerjanya; (2) menyediakan dan mendistribusikan sarana produksi

pertanian kepada petani melalui mekanisme yang adil dan transparan; serta (3) membina dan mendampingi kelembagaan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai unit produksi, unit belajar, dan unit bisnis yang mandiri

b. Kejelasan Peran

Peran tersebut mencakup penyuluhan, pendampingan teknis, serta pemberian bantuan sarana produksi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bunga mawar. Secara kelembagaan, posisi Dinas Pertanian sebagai pembina teknis pertanian telah dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha tani di Desa Cluntang. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran, petani masih menghadapi kendala dalam perawatan tanaman, terutama pada serangan hama, proses tanam ulang, serta menjaga keberlanjutan produksi agar tetap stabil sepanjang musim. Hal ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pertanian sudah cukup jelas sebagai penyedia dukungan teknologi dan pengembangan SDM, serta sebagai pembina kelembagaan kelompok tani. Namun demikian, intensitas, konsistensi, dan keberlanjutan pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan agar mampu menjawab secara lebih efektif kebutuhan teknis petani, khususnya dalam mengatasi permasalahan budidaya dan meningkatkan produktivitas bunga mawar secara berkelanjutan.

c. Harapan Peran

Harapan terhadap Dinas Pertanian tergolong tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Cluntang memiliki harapan agar dinas pertanian dapat memberikan dukungan dalam bentuk program budidaya yang lebih modern, pendampingan teknis, serta pelatihan kepada petani. Hal ini disampaikan oleh informan yang menyatakan: *“Kami berharap ada program terkait budidaya tanaman mawar yang lebih modern dan lebih baik, serta adanya pendampingan teknis dan pelatihan agar petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas bunga mawar.”*, (BA, 2026)

Kelompok Wanita Tani (KWT) juga memiliki harapan agar program yang diberikan oleh dinas pertanian dapat mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok serta sesuai dengan kebutuhan petani. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut: *“Yang kita cari itu jalannya untuk kesejahteraan kelompok, supaya kelompok bisa lebih disiplin dan berkembang, serta mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan”*, (SI, 2026)

Di sisi lain, petani bunga mawar juga memiliki harapan terhadap dukungan stakeholder, terutama dalam mengatasi permasalahan teknis budidaya. Berdasarkan hasil wawancara, petani mengalami kendala dalam mempertahankan tanaman mawar agar dapat tumbuh secara optimal, sebagaimana disampaikan oleh informan: *“Sekarang kendalanya itu pada perawatan, kalau tanam ulang susah hidup. Kadang sudah ditanam bagus, tapi satu tahun kemudian mati atau berkurang. Mungkin tanahnya sudah jenuh atau karena penggunaan pestisida, jadi petani butuh pendampingan dan solusi.”*, (BA, 2026)

Harapan ini menunjukkan bahwa peran stakeholder masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih optimal dalam mendukung pengembangan bunga mawar di Desa Cluntang.

2. Dinas UMKM

a. Norma Peran

Norma peran Dinas UMKM yang sesungguhnya bergerak di wilayah yang berbeda dari Dinas Pertanian ia bertanggung jawab pada dimensi hilir dari rantai nilai bunga mawar, mencakup penguatan kapasitas usaha, fasilitasi legalitas, pengembangan inovasi produk, dan perluasan akses pasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang UMKM, khususnya Pasal 21, mewajibkan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha melalui: (a) pengembangan SDM pelaku UMKM; (b) pengembangan teknologi dan sistem informasi usaha; (c) penyediaan pembiayaan dan penjaminan; (d) fasilitasi promosi dagang dan pemasaran; serta (e) pengembangan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM pada Pasal 5 juga menetapkan kewajiban menumbuhkan iklim usaha kondusif, termasuk fasilitasi perizinan usaha, standarisasi produk, dan akses pasar.

Dari kerangka hukum tersebut, tiga ekspektasi normatif mandatori dapat dirumuskan: (1) mendorong transformasi usaha dari penjualan bahan mentah menuju produk olahan bernilai tambah melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknologi pengolahan; (2) memfasilitasi standarisasi dan legalitas usaha (NIB, PIRT, HaKI/merek) sebagai persyaratan bagi akses pasar yang lebih luas; dan (3) membuka dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM melalui fasilitasi promosi, pameran, dan kemitraan strategis. Informan Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan informan:

“pembinaan dan peningkatan kapasitas kerja, fasilitas perizinan, dan akses permodalan”, (WI, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa norma peran Dinas UMKM tidak hanya terbatas pada aspek pemasaran, tetapi juga mencakup pembinaan administratif dan legalitas usaha seperti NIB, PIRT, serta akses permodalan yang menjadi fondasi pengembangan UMKM. Dapat dipahami bahwa Dinas UMKM memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan potensi bunga mawar, khususnya dalam aspek hilirisasi produk dan penguatan sistem pemasaran. Namun, efektivitas norma peran ini sangat bergantung pada implementasi program yang tepat sasaran serta koordinasi dengan stakeholder lain seperti Dinas Pertanian dan pemerintah desa.

b. Kejelasan peran

Partisipasi dalam pameran dan bazar merupakan bentuk dukungan pasar yang memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Namun demikian, kegiatan tersebut masih bersifat insidental dan belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem pemasaran yang berkelanjutan. Dinas UMKM juga berperan dalam aspek legalitas dan standarisasi usaha, sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Sosialisasi, standarisasi dan sertifikasi seperti NIB, PIRT, HaKI/Merek. Sosialisasi perbaikan desain pengemasan, pelatihan digital marketing.”, (WI,2026)

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif, Dinas UMKM telah menjalankan fungsi pengembangan SDM dan dukungan teknologi usaha melalui sosialisasi legalitas, peningkatan kualitas kemasan, serta pelatihan pemasaran digital. Program tersebut sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk bunga mawar, khususnya apabila dikembangkan ke arah produk olahan bernilai tambah.

c. Harapan peran

Harapan masyarakat terhadap Dinas UMKM terletak pada dukungan pasar. Kelompok wanita tani (KWT) berharap Dinas UMKM dapat lebih aktif dalam membuka akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Meskipun kegiatan tersebut membantu dalam promosi, masyarakat berharap adanya sistem pemasaran yang lebih terstruktur, seperti kemitraan dengan pelaku usaha, akses ke pasar modern, serta pemanfaatan platform digital secara lebih optimal. Harapan ini menunjukkan

bahwa KWT membutuhkan kepastian pasar dan stabilitas harga agar usaha bunga mawar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Masyarakat berharap Dinas UMKM dapat meningkatkan intensitas pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta strategi pemasaran digital. Keterbatasan kapasitas pelaku UMKM menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan usaha. Banyak petani masih berfokus pada penjualan bunga segar dan belum mengembangkan produk olahan bernilai tambah seperti teh mawar, sirup mawar, minyak atsiri, atau produk turunan lainnya. Oleh karena itu, harapan terhadap Dinas UMKM adalah adanya pendampingan yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan inovasi dan manajemen usaha.

3. Permerintah Desa

a. Norma Peran

Norma peran Pemerintah Desa yang sesungguhnya mengalami pergeseran fundamental sejak lahirnya UU Desa, ia bukan lagi sekadar kepanjangan tangan pemerintah kabupaten, melainkan subjek otonom yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang secara hukum mandiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 26) menetapkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih spesifik, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Pasal 5) menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk penguatan ketahanan pangan dan pengembangan potensi lokal, termasuk pengembangan komoditas unggulan desa.

Regulasi ini mengandung implikasi normatif yang sangat kuat: pemerintah desa wajib mengidentifikasi dan mengalokasikan Dana Desa untuk pengembangan komoditas lokal yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakatnya. Tiga normatif yang bersifat mandatori dapat dirumuskan: (1) mengintegrasikan pengembangan komoditas unggulan lokal ke dalam RPJMDes dan RKPDes; (2) mengalokasikan Dana Desa secara proporsional untuk mendukung infrastruktur, kelembagaan, dan kapasitas petani; dan (3) memfasilitasi koordinasi aktif antar stakeholder eksternal agar program yang masuk ke desa bersifat sinergis dan tidak tumpang tindih. Namun demikian, norma peran pemerintah desa dalam pengembangan bunga mawar masih terbatas, terutama dalam aspek kebijakan dan penganggaran. Hal ini terlihat dari pernyataan informan berikut:

“Belum ada kebijakan atau anggaran khusus dari Pemerintah Desa yang dialokasikan untuk pengembangan bunga mawar disini.” (BA, 2026)

Secara keseluruhan, norma peran pemerintah desa dalam pengembangan bunga mawar sudah jelas sebagai fasilitator, mediator, dan penghubung antar stakeholder. Untuk mendorong pengembangan potensi bunga mawar secara lebih berkelanjutan, pemerintah desa perlu meningkatkan perannya tidak hanya sebagai penghubung, tetapi juga sebagai penggerak melalui kebijakan desa dan dukungan pendanaan yang lebih konkret.

b. Kejelasan Peran

Kejelasan peran pemerintah desa terlihat dari upayanya dalam menyampaikan kebutuhan petani kepada dinas terkait serta mendukung kegiatan pertanian di tingkat desa. Kejelasan peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan penghubung aspirasi masyarakat sejalan dengan penelitian (Purnamasari & Sukmana, 2025). Yang menyatakan bahwa pemerintah desa dalam pengembangan komoditas unggulan

berfungsi sebagai bridging institution, yaitu lembaga yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah daerah. Ketika desa mampu menyampaikan aspirasi petani kepada dinas terkait, maka arus komunikasi vertikal menjadi lebih efektif dan responsif.

Pemerintah Desa Cluntang memahami bahwa bunga mawar merupakan komoditas unggulan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pengembangan sektor pertanian dan agrowisata. Desa menyadari bahwa pengembangan komoditas ini tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyentuh aspek diversifikasi usaha, akses pasar, investasi, serta potensi agrowisata. Artinya, secara konseptual kejelasan peran antar stakeholder telah dipahami, termasuk pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dapat disimpulkan bahwa kejelasan peran pemerintah desa secara konseptual sudah cukup jelas. Desa memahami posisinya sebagai fasilitator, penghubung, dan pendukung pengembangan komoditas mawar. Namun, pada tataran implementasi, peran tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berkembang menjadi peran strategis yang proaktif dalam memperkuat koordinasi, dukungan pasar, dan integrasi program lintas stakeholder.

c. Harapan Peran

Harapan terhadap peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi bunga mawar di Desa Cluntang cenderung mengarah pada penguatan fungsi strategis desa, tidak hanya sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai penggerak dan penginisiasi program pengembangan komoditas unggulan. Harapan terhadap peran Pemerintah Desa tidak hanya sebatas pada fungsi administratif dan koordinatif, tetapi berkembang menuju peran yang lebih strategis, proaktif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Masyarakat menginginkan pemerintah desa menjadi motor penggerak yang mampu mengintegrasikan dukungan pasar, teknologi, dan pengembangan SDM dalam satu arah kebijakan yang terstruktur.

4. Kelompok Wanita Tani

a. Norma Peran

Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki norma peran sebagai penggerak kegiatan kelompok sekaligus pengembang usaha berbasis bunga mawar. Didalam AD/ART Bab IV pasal 4 (peran dan Fungsi) menyebutkan Peran KWT adalah memfasilitasi atau memberikan pelayanan kepada anggota dalam urusan usaha tani agribisnis, dan memberikan pelayanan kepada anggota dalam pengembangan kreatifitas dan produktifitas dalam usaha bunga mawar. Sebagai organisasi kolektif, KWT menjadi ruang belajar bersama, berbagi pengalaman, dan membangun komitmen anggota dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Norma peran KWT dalam pengembangan potensi bunga mawar telah berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai organisasi penggerak usaha dan pemberdayaan anggota. Namun, efektivitas peran tersebut masih sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal, terutama dalam hal perluasan pasar, penguatan teknologi pengolahan, serta pendampingan berkelanjutan dari stakeholder terkait.

b. Kejelasan Peran

KWT berfungsi sebagai perantara informasi, baik dalam menyampaikan kebutuhan anggota kepada dinas maupun dalam mendistribusikan informasi program, bantuan, dan pelatihan kepada anggota. KWT juga menjadi wadah dalam mengakses program bantuan dan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, peran KWT telah dipahami dengan jelas oleh anggota maupun stakeholder lain sebagai pintu

masuk utama dalam pengembangan komoditas mawar di tingkat kelompok. Selain itu, kejelasan peran KWT dalam pengembangan usaha terlihat dari upaya diversifikasi produk: "Dengan diversifikasi produk.", (SI, 2026)

Diversifikasi produk menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan peran KWT sebagai pengembang usaha berbasis mawar. Penelitian oleh (Nurdiansyah et al., 2023) menunjukkan bahwa kelompok wanita tani yang memahami perannya sebagai pengembang usaha tidak hanya fokus pada produksi primer, tetapi juga melakukan hilirisasi melalui diversifikasi produk.. Dalam konteks ini, KWT telah menjalankan perannya dalam mendukung hilirisasi produk dan memperkuat daya saing.

Kejelasan peran KWT dalam pengembangan bunga mawar dapat dikatakan cukup jelas pada aspek kelembagaan, komunikasi, dan inisiatif diversifikasi produk. Namun, dalam aspek penguatan pasar dan pengembangan teknologi pengolahan, peran tersebut masih memerlukan sinergi dan dukungan yang lebih intensif dari pemerintah desa dan dinas terkait. Dengan adanya komitmen jangka panjang dan pendampingan berkelanjutan, KWT berpotensi menjadi motor utama dalam pengembangan potensi bunga mawar di Desa Cluntang Kecamatan Musuk.

c. Harapan Peran

Harapan terhadap peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengembangan potensi bunga mawar cukup besar, mengingat KWT merupakan pelaku utama di tingkat lapangan sekaligus penggerak kegiatan usaha berbasis mawar. Harapan juga diarahkan pada peningkatan inovasi dan diversifikasi produk. Meskipun KWT telah melakukan diversifikasi, pengembangan produk turunan mawar diharapkan dapat lebih variatif dan memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini memerlukan peningkatan keterampilan teknis, kreativitas, serta kemampuan membaca peluang pasar.

Harapan terhadap peran KWT mengarah pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan inovasi produk, perluasan akses pasar, serta konsistensi dalam menjalankan program jangka panjang. KWT diharapkan mampu berkembang dari sekadar wadah organisasi menjadi unit usaha kolektif yang profesional dan berdaya saing, sehingga dapat menjadi motor utama dalam pengembangan potensi bunga mawar di Desa Cluntang dan Kecamatan Musuk secara berkelanjutan.

5. Petani

a. Norma Peran

Petani merupakan pelaku utama dalam pengembangan bunga mawar. Norma peran petani adalah melaksanakan kegiatan budidaya serta menerapkan teknologi dan inovasi yang diberikan oleh stakeholder terkait. Penelitian oleh (Wibowo, 2023) dalam Jurnal Agronomi Indonesia menegaskan bahwa petani merupakan aktor kunci dalam sistem agribisnis hortikultura karena keberhasilan produksi sangat ditentukan oleh ketepatan teknik budidaya di tingkat lapangan.

Petani bunga mawar memiliki norma peran sebagai pelaksana kegiatan budidaya mulai dari penanaman, perawatan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, hingga proses panen. Aktivitas tersebut dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai sumber mata pencaharian utama. Dalam konteks ini, petani menjadi fondasi utama dalam menjaga kontinuitas produksi bunga mawar di Desa Cluntang.

Norma peran petani sebagai pelaku utama budidaya bunga mawar telah berjalan dengan baik dalam menjaga keberlanjutan produksi. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas, petani masih memerlukan dukungan teknis, penguatan kapasitas SDM, serta integrasi yang lebih kuat dengan stakeholder lain

dalam aspek teknologi dan pemasaran. Tanpa sinergi tersebut, peran petani akan tetap terbatas pada produksi dasar dan belum mampu berkembang secara optimal dalam sistem agribisnis bunga mawar yang berkelanjutan.

b. Kejelasan Peran

Petani menyadari bahwa kualitas dan kuantitas produksi ditentukan oleh ketekunan dalam perawatan, pengendalian hama penyakit, serta pengelolaan siklus tanam. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala internal yang memengaruhi konsistensi pelaksanaan peran tersebut. Salah satu kendala yang disampaikan oleh pihak BPP adalah:

“Tidak konsistennya petani dalam melakukan produksi olahan bunga mawar, jadi ketika produk tidak ada pesanan ya mereka berhenti produksi karena ada peluang untuk penjualan bunga tabur yang lebih menjanjikan di musim tertentu.”, (IY, 2026)

Hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi program pengembangan juga dipengaruhi oleh tingkat komitmen petani dalam menjalankan kegiatan secara berkelanjutan. Dampaknya, dukungan dari stakeholder seperti dinas juga menjadi tidak optimal karena keberlanjutan program memerlukan partisipasi aktif dan stabil dari petani. Oleh karena itu, diperlukan penguatan motivasi, pendampingan intensif, serta sistem insentif pasar yang lebih stabil agar petani tidak hanya berorientasi pada peluang musiman, tetapi mampu membangun usaha bunga mawar yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

c. Harapan Peran

Dari perspektif BPP, harapan terhadap petani tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan meningkatkan nilai tambah komoditas, sebagaimana disampaikan:

“Petani bunga mawar bisa mendapatkan tambahan hasil dari budidaya bunga mawar. Karena kan yang menjadi andalan pada saat-saat Sya’ban, tapi jika di hari biasa diharapkannya diubah menjadi produk-produk supaya memiliki nilai tambah.”, (IY, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat harapan agar petani tidak hanya bergantung pada momentum pasar tertentu, seperti saat bulan Sya’ban yang identik dengan peningkatan permintaan bunga tabur. Petani diharapkan mampu memanfaatkan produksi di luar musim tersebut dengan mengolah bunga mawar menjadi produk bernilai tambah.

Sementara itu, dari sisi Dinas UMKM, harapan terhadap petani lebih menekankan pada aspek kontinuitas dan kualitas produksi, sebagaimana disampaikan:

“Harapannya petani bunga mawar menjaga kontinuitas pasokan dan kualitas bunga mawar, menerapkan budidaya yang baik dan berkelanjutan.”, (WI, 2026)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam rantai nilai usaha, petani memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku. Tanpa kontinuitas produksi dan standar kualitas yang baik, pengembangan usaha olahan maupun perluasan pasar akan sulit dicapai.

Secara keseluruhan, harapan terhadap peran petani dalam pengembangan bunga mawar di Kecamatan Musuk mengarah pada tiga aspek utama, yaitu aspek teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan aspek pasar. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam mendorong keberlanjutan komoditas mawar sebagai produk unggulan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Program – program yang diberikan oleh stakeholder terhadap pengembangan potensi bunga mawar di Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Boyolali dengan keterlibatan memberikan program-program dan dukungan berupa pendampingan teknis, pelatihan, bantuan sarana produksi, dukungan pemasaran, serta fasilitasi koordinasi antar stakeholder.
2. Peran Stakeholder dalam mengembangkan potensi bunga mawar di Desa Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Dinas pertanian melalui penyuluh pertanian sebagai pendamping, dinas umkm dalam pengembangan usaha dan pemasaran produk olahan mawar, pemerintah desa sebagai fasilitator dan koordinasi, serta petani sebagai pelaku utama yang menjalankan proses budidaya dan produksi. Sinergi antar stakeholder tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan potensi bunga mawar secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. P., & Nugroho, R. A. (2020). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Usaha Tani Hortikultura Berbasis Komunitas. *Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Masyarakat*, 5(1), 112–120.
- Dewi, R. (2025). *Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Kelompok Tani Padi Sawah Di Kecamatan Sekampung Dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*.
- Edy, S., Zarliani, W. O. Al, Basir, M. A., & Pattiha, M. (2024). Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kapasitas Usaha Dalam Memaksimalkan Potensi Petani Nenas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 03(01), 12–20.
- Hidayati, F., Rahmat Syahni, Suliansyah, I., & Tanjung, H. B. (2025). *Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian Di Indonesia: Tantangan Dan Alternatif Solusi*. 12(1), 329–348.
- Huda, N., Wibowo, A., & Winarno, J. (2021). *Pengembangan Kapasitas Kelompok Tani dalam Penerapan Pertanian Terpadu di Nglebak, Karanganyar*. 2(2), 143–154.
- Ladunni, F. T., Kurniawati, F., & Dinarti, S. I. (2025). *Pemberdayaan Kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. 3, 319–325.
- Nurdiansyah, D., Fauziah, R., Hambali, M. R., Ni'mah, F., & Fawaiq, M. J. (2023). *Pelatihan Pengolahan Mawar sebagai Produk Makanan di Desa Kalangan Kabupaten Bojonegoro*. 12(2), 735–742.
- Purnamasari, A. M., & Sukmana, H. (2025). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pertanian Di Desa Wilayut*. 4(2), 601–622.
- Putri, N. D., & Sari, M. Y. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Hortikultura Lokal. *Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Pembangunan*, 3(1), 88–96.
- Sukmayanto, M. (2021). *Kapasitas Petani dan Produktivitas Padi Sawah Di Kabupaten Lampung Tengah*.
- Sulistyorini, A., & Utomo, R. B. (2023). *Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Manajemen Persediaan Pada Ukm Putri Mawar Desa Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*. 4(2), 2766–2771.
- Wibowo, A. (2023). *Analisis Peran Lembaga Dan Model Kelembagaan Pada Sistem Agribisnis Hortikultura Sayuran Semusim Di Kelurahan Kampung Enam*.